

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM REHABILITASI SOSIAL DAERAH KUMUH (RSDK) DI KELURAHAN PLOSO, KECAMATAN TAMBAKSARI, SURABAYA.

Nindyra Ayu Sagita

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
e-mail: as.nindyra@gmail.com

Muhammad Farid Ma'ruf

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
e-mail: muhammadfarid@unesa.ac.id

Abstrak

Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh Kota Surabaya merupakan program pembangunan berdasar partisipasi masyarakat (*Community Based Development*). Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh di kota Surabaya merupakan salah satu upaya meningkatkan kondisi permukiman dan sosial masyarakat di kota Surabaya. Dalam pelaksanaan program ini, Kelurahan Ploso memperoleh 2 (dua) kuota penerima manfaat program. Namun, terdapat ketidaksamaan respon masyarakat terhadap partisipasi dalam program ini. Tujuan dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) di Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Surabaya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengambilan sumber data dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Sementara itu, fokus dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi ketidaksamaan respon masyarakat dalam Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh di Kelurahan Ploso Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya. Indikator yang digunakan adalah model CLEAR yang diajukan oleh *Pratchett et. al. (2009: 9)*, yaitu *Can do, Like to, Enable to, Asked to, Responded to*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari model *Can do* masyarakat Kelurahan Ploso dapat berpartisipasi dalam program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh dan model *Enable to* masyarakat memiliki akses seluas-luasnya untuk berpartisipasi, khususnya dalam perbaikan Rumah tak layak huni. Akan tetapi ketidaksamaan respon mereka dalam partisipasi ditunjukkan dari partisipasi masyarakat RT 05 RW 06 dalam perbaikan rumah Bapak M. Cholil sedangkan masyarakat RT 05 RW 10 tidak berpartisipasi dalam perbaikan rumah Ibu Djamah dilihat dari Model *Like to, asked to, dan responded to*. Ketidaksamaan tersebut disebabkan karena sosialisasi yang kurang merata dan kurangnya pemahaman mereka terhadap program.

Kata kunci : Partisipasi, Rehabilitasi Sosial, Daerah Kumuh

Abstract

Regional Social Slum Rehabilitation Program Surabaya is based on the development program community participation (*Community Based Development*). The implementation of the Regional Social Slum Rehabilitation Program in the city of Surabaya is one effort improve social conditions and public housing in the city of Surabaya. In implementing this program, Village Ploso get 2 (two) quota beneficiaries of the program. However, there is inequality of public response to participation in the program. The purpose of this study to describe people's participation in the Regional Social Slum Rehabilitation Program (RSDK) in Sub Ploso, Tambaksari District, Surabaya. This type of research used in this research is descriptive with qualitative approach. The technique of exploration data in this study using purposive sampling technique The indicator used is the model proposed by *Pratchett CLEAR et. al. (2009: 9)*, namely *Can do, Like to, Enable to, Asked to, Responded to*. The results showed that the model *Can do* Ploso Village community can participate in the program and the Slum Rehabilitation Regional Social model *Enable to* the public has the widest access to participate, particularly in the improved house is not livable. But inequality in their responses indicated the participation of community participation in RT 05 RW 06 home improvement Mr. M. Cholil while RT 05 RW 10 community did not participate in home improvement Mrs. Djamah seen from Model *Like to, asked to, and Responded to*. The inequalities are caused by socialization less evenly and lack of their understanding to the program.

Keywords: Participation, Social Rehabilitation, Regions Slum

PENDAHULUAN

Seiring dengan tingginya kepadatan penduduk Kota Surabaya ditinjau dari data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (2012) jumlah penduduk Kota Surabaya tahun 2012 sebanyak 3.125.576 jiwa dengan wilayah seluas 32.519 Ha atau 325,19 km² (1km²=100 Ha) sehingga kepadatan penduduk Kota Surabaya sebesar 9611,54 jiwa/km², maka kebutuhan akan penyediaan prasarana dan sarana permukiman akan tinggi pula baik melalui peningkatan kualitas rumah itu sendiri maupun pembangunan rumah baru. Disisi lain, pertumbuhan daerah kumuh yang ditandai dengan munculnya pemukiman kumuh dan rumah-rumah tak layak huni juga semakin tinggi pula. Hal tersebut ditandai dengan luasnya lingkungan pemukiman kumuh sebesar 329,1 Ha dari total luas Kota Surabaya sebesar 32.519 Ha atau 1,01% pada tahun 2012 yang tersebar di 31 kecamatan yang diperoleh dari data Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya. Sedangkan menurut data Dinas Sosial Kota Surabaya, Surabaya memiliki rumah tak layak huni sebanyak 400 rumah dari total 679.091 rumah atau 0,06% pada tahun 2012 yang tersebar di 31 kecamatan.

Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya adalah menjalankan program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh sejak tahun 2011 untuk memperbaiki lingkungan yang kumuh dan rumah tak layak huni. Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh merupakan program dari Pemerintah Kota Surabaya pembangunan berdasar partisipasi masyarakat (*community based development*) dan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan *bottom up* dimana pelaksanaan kegiatan di lapangan dilakukan atas inisiatif dan aspirasi dari masyarakat.

Hal demikian bertolak belakang dengan kenyataan pada partisipasi masyarakat Kelurahan Ploso pada saat pembangunan rumah Bapak M. Cholil sebagai penerima program RSDK 2015 karena kebakaran. Rumah tersebut adalah satu dari 2 (dua) rumah di Kelurahan Ploso sebagai penerima program RSDK tahun 2015. Sedangkan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk kesuksesan perbaikan rumah dalam program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh. Hal tersebut dikarenakan program ini dilakukan dengan pendekatan partisipasi masyarakat, khususnya di Kelurahan Ploso sebagai lokasi penelitian. Partisipasi tidak hanya dihitung secara kuantitas kehadiran masyarakat kelurahan Ploso atau pihak-pihak yang terlibat dalam program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh melainkan juga harus dilihat dari kualitas partisipasi dalam keterlibatan program tersebut.

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul: “PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM REHABILITASI SOSIAL DAERAH KUMUH (RSDK) DI KELURAHAN PLOSO, KECAMATAN TAMBAKSARI, SURABAYA.”

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti adalah: bagaimana partisipasi masyarakat dalam Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) Di Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Surabaya?

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: untuk mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) di Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Surabaya.

MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan referensi untuk ilmu administrasi negara agar mahasiswa lebih memahami tentang aplikasi teori tentang teori partisipasi masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Kelurahan Ploso

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan, koreksi serta saran bagi Kelurahan Ploso untuk meningkatkan partisipasi dalam program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi bahan informasi untuk aktivitas kajian ilmiah bagi peneliti lain khususnya yang berkaitan dengan penelitian Partisipasi Masyarakat Dalam Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) di Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Surabaya.

c. Bagi Universitas Negeri Surabaya

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan berupa hasil atau laporan penelitian. Laporan penelitian tersebut nantinya dapat digunakan sebagai refrensi atau literatur untuk Universitas Negeri Surabaya pada penelitian selanjutnya yang serupa.

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Tentang Partisipasi Masyarakat

1. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Menurut Rahadiani (2014: 15), partisipasi masyarakat sangat penting dalam berjalannya suatu program yang ada dalam masyarakat. Partisipasi masyarakat yang baik dan dapat mendukung berhasilnya program tersebut adalah partisipasi aktif. Maksudnya adalah partisipasi dari masyarakat dimana masyarakat ikut serta secara langsung dalam memberikan masukan, pelaksanaan maupun pengawasan program. Untuk itu diperlukan partisipasi dengan sifat yang positif, kreatif, kritis, korektif konstruktif dan realistis.

Jadi, partisipasi masyarakat merupakan manifestasi tanggung jawab sosial dari individu-individu bermasyarakat terhadap komunitasnya sendiri maupun dengan komunitas luar dengan menunjukkan sikap sukarela masyarakat untuk membantu keberhasilan program pembangunan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain, kualitas partisipasi masyarakat menentukan keberhasilan suatu program serta peningkatan kesejahteraan khususnya pada kelompok sasaran dan juga masyarakat pada umumnya.

2. Model Partisipasi

Model partisipasi yang ditawarkan oleh Pratchett dkk (2009:9) berisi 5 (lima) faktor yang dapat mengidentifikasi ketidaksamaan respon masyarakat terhadap partisipasi. Menurut Pratchett dkk (2009:1), model CLEAR hadir sebagai alat diagnosis respon masyarakat dalam berpartisipasi, mengantisipasi hambatan-hambatan partisipasi yang ada di masyarakat, dan sebagai respon kebijakan pemerintah. Model Clear berpendapat bahwa partisipasi akan sangat efektif dimana masyarakat:

a. *Can do.*

Refers largely to arguments about socio-economic-status, which have traditionally dominated explanations for variations in participation rates (Verba et al 1995). The claim is that when people have the appropriate skills and resources they are more able to participate. These skills range from the ability and confidence to speak in public or write letters, to the capacity to organise events and encourage others of similar mind to support initiatives. Access to the resources that facilitate such activities is

also important (resources ranging from photocopying facilities through to internet access and so on). These skills and resources are much more commonly found among the better educated and employed sections of the population: those of higher socio-economic status. However, none of the requisite skills and resources is exclusively the property of high SES. It is possible for public, voluntary or community bodies to intervene to make up for socio-economic limitations in equipping citizens with the skills and resources for participation. 'Can do' can be delivered by capacity building efforts aimed at ensuring that citizens are given the support to develop the skills and resources needed for them to engage.

b. *Like to.*

Rests on the idea that people's felt sense of being part of something encourages them to engage. The argument is that if you feel a part of something then you are more willing to engage. If you feel excluded or sense that you are not welcome then you may decide not to participate. If participation is seen as just for old people or for men then others may not feel comfortable or able to join in. A sense of trust, connection and linked networks can, according to the social capital argument, enable people to work together and co-operate more effectively (Putnam 2000). Sense of community can be a strong motivator for participation. But given the inherent diversity in many communities then, conversely, an absence of identity or a sense of being an outsider can militate against participation. This factor can also be addressed by policy makers and non-governmental practitioners seeking to promote participation (Pratchett and Wilson 2001). The most important initial step in diagnosis is to gain an understanding of the sense of loyalties and identities held in various communities. It is not easy to manipulate or change these feelings held about the communities in which people live but it is possible to give people the opportunity to believe that they are part of a wider civic identity built around their locality or some sense of equal and shared citizenship. Recognising and promoting a sense of civic citizenship and community

cohesion can help develop an environment in which people will like to participate.

c. Enable to.

As a factor in participation, is premised on the research observation that most participation is facilitated through groups or organizations (Parry et al 1992, Pattie et al 2004). Political participation in isolation is more difficult and less sustainable (unless an individual is highly motivated) than the mutually reinforcing engagement of contact through groups and networks. Collective participation provides continuous reassurance and feedback that the cause of engagement is relevant and that participation is having some value. Indeed, for some, engagement in this manner is more important than the outcome of such participation. The existence of networks and groups which can support participation and which can provide a route into decision-makers, therefore, is vital to the vibrancy of participation in an area. Research shows the relevance of civic infrastructures to facilitating or inhibiting participation (Pratchett et al 2006a). Where the right range and variety of groups exists to organise participation there tends to be more of it. Umbrella organizations that can support civic, community and voluntary groups can play a particularly important role in providing and sustaining the context for the appropriate types of groups and participation platforms to emerge. They can help groups become established, provide networks of contacts and information, explain how to campaign and engage and ease access to the relevant decision-makers.

d. Asked to.

Builds on the finding of much research that mobilisation matters. People tend to become engaged more often and more regularly when they are asked to engage. Research shows that people's readiness to participate often depends upon whether or not they are approached and how they are approached (Verba et al 1995). Mobilisation can come from a range of sources but the most powerful form is when those responsible for a decision ask others to engage with them in making the decision. Research shows that the degree of openness of political and managerial systems has a significant effect, with participation increasing where there is a

variety of invitations and opportunities (Pratchett et al 2006a). The variety of participation options for engagement is important because some people are more comfortable with some forms of engagement, such as a public meeting, while others would prefer, for example, to engage through on-line discussions (Pratchett et al 2001a). Some people want to talk about the experiences of their community or neighbourhood while others want to engage based on their knowledge of a particular service as a user.

e. Responded to.

Captures the idea that for people to participate on a sustainable basis they have to believe that their involvement is making a difference, that it is achieving positive benefits. This factor provides simultaneously the most obvious but also the most difficult factor in enhancing political participation (Pratchett et al 2001b). For people to participate they have to believe that they are going to be listened to and, if not always agreed with, at least in a position to see that their views have been taken into account. Meeting the challenge of the 'responded to' factor means asking public authorities how they weigh messages from various consultation or participation events against other inputs to the decision-making process? How are the different or conflicting views of various participants and stakeholders to be prioritised? Responsiveness is about ensuring feedback, which may not be positive – in the sense of accepting the dominant view from participants. Feedback involves explaining how the decision was made and the role of participation within that. Response is vital for citizen education, and so has a bearing on the 'front end' of the process too. Citizens need to learn to live with disappointment participation won't always 'deliver' on immediate concerns, but remains important. Citizens' confidence in the participation process cannot be premised upon 'getting their own way'. Indeed, ensuring responsiveness depends upon the quality of elected representatives and democratic leadership. Improving deliberation and accountability mechanisms within 'mainstream democracy' is a

precondition for effective empowerment strategies.

B. Kajian Tentang Rehabilitasi Sosial

Pada hakekatnya sejak manusia menyadari dan menghawatirkan hidupnya serta kesejahteraan sesama manusia, sejak itu pula upaya-upaya rehabilitasi telah dilakukan. Menurut Departemen Sosial (2002), rehabilitasi sosial adalah:

“Suatu rangkaian kegiatan professional dalam upaya mengembalikan dan meningkatkan kemampuan warga masyarakat baik perorangan, keluarga maupun kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar, dan dapat menempuh kehidupan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya.”

Berbagai usaha diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan diatas. Usaha rehabilitasi merupakan proses rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh petugas rehabilitasi secara bertahap, berkelanjutan, dan terus menerus sesuai dengan kebutuhan.

C. Kajian Tentang Permukiman Kumuh

Pengertian dasar permukiman dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Sedangkan kumuh dapat diartikan sebagai tanda atau cap yang diberikan golongan atas yang sudah mapan kepada golongan bawah yang belum mapan. Permukiman kumuh berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (13) adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini penelitian deskriptif kualitatif ini data yang diperoleh nantinya akan diolah, dianalisis, dan digambarkan dengan jelas mengenai keadaan sebenarnya respon masyarakat yang berbeda terhadap partisipasi partisipasi dalam Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh di Kelurahan Ploso Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya dengan menggunakan Model Clear dari Pratchett et,al yang terdiri dari indikator *can do, like to, enable to, asked to, responded to*. Subjek penelitian terdiri dari Kepala Bagian RSDK, UPKM, penerima manfaat, dan ketua RT. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara,

observasi, serta dokumentasi. Analisis dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yakni dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh

Berdasarkan Peraturan Walikota No. 41 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh Kota Surabaya menyatakan bahwa program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh merupakan program pembangunan berdasar partisipasi masyarakat (*Community Based Development*). Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh di kota Surabaya merupakan salah satu upaya meningkatkan kondisi permukiman dan sosial masyarakat di kota Surabaya, di mana penanganannya dilakukan secara terpadu baik dalam hal perbaikan fisik lingkungan, sosial maupun ekonomi masyarakat di lingkungan perkampungan. Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh, diimplementasikan dalam kerangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Tujuan program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh di Kota Surabaya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan/atau keluarga miskin utamanya di kawasan permukiman kumuh;
2. Meningkatkan kualitas lingkungan hunian melalui suatu upaya penyadaran dan perlunya penanganan terpadu baik dari aspek fisik, sarana dan prasarana maupun kondisi sosial ekonomi masyarakatnya
3. Pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan inisiatif, kreatifitas, dan jiwa kemandirian dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kesejahteraan di lingkungan tempat tinggalnya;
4. Meningkatkan kemampuan usaha dalam rangka pengembangan sumber pendapatan yang dapat menunjang perekonomian keluarga.

B. Partisipasi Masyarakat dalam Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh di Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Surabaya.

Jumlah dana bagi penerima manfaat program RSDK tahun 2015 sebesar 10,5 juta dari hasil bagi jumlah anggaran dengan jumlah penerima. Dana tersebut yang dialokasikan untuk pembelian bahan bangunan untuk perbaikan rumah tak layak huni penerima manfaat program. Dana tersebut

dipercayakan pada UPKM Sejahtera Kelurahan Ploso sebagai pelaksana program di lapangan.

Tabel 1.

Penerima Program RSDK Kelurahan Ploso Tahun 2015

NO	NIK	NAMA	ALAMAT	RT	RW
1	3578102006770003	M. Cholil	Jl. Kanser No.100	05	06
2	3578100401088410	Djamah	Jalan Ploso Timur 1 Masjid No. 1	05	10

Sumber: SPJ RSDK Kelurahan Ploso

Tabel 2.

Rekapitulasi Pembelian Bahan Bangunan Program RSDK Kelurahan Ploso Tahun 2015

Nama Penerima	Tanggal Pembelian	Jumlah (Rp)	Total
Djamah	17-11-2015	4.834.000	7.973.000
	18-11-2015	500.000	
	20-11-2015	2.170.000	
	22-11-2015	469.000	
M. Cholil	17-11-2015	4.425.000	8.017.000
	19-11-2015	600.000	
	20-11-2016	2.463.000	
	22-11-2016	529.000	
Grand Total			15.990.000

Sumber: SPJ RSDK Kelurahan Ploso

Tabel 3.

Daftar Penerima Upah Perbaikan Rumah Tak Layak Huni Program RSDK Kelurahan Ploso Tahun 2015

No	Kegiatan	Nama	Alamat	Jumlah	Total
1	Upah Tukang	Sumadi	Karangasem 10/12A	1.330.000	2.660.000
		Ponco	Karangasem 4/108	1.330.000	
2	Upah Pembantu Tukang	Nur	Kapas baru 2/5A	1.050.000	2.100.000
		Yudi	Karangasem 16/114	1.050.000	
3	Upah pengawas Tukang	Soeparman	Ploso 3A/17	250.000	250.000
Grand Total					5.010.000

Sumber: SPJ RSDK Kelurahan Ploso

Melihat adanya perbedaan respon masyarakat terhadap partisipasi dalam program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh, maka peneliti menggunakan model CLEAR untuk mengidentifikasi ketidaksamaan respon warga Kelurahan Ploso dalam hal partisipasi.

1. Can Do

Seluruh pihak yang terlibat dalam program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh baik Dinas Sosial, Unit Pembinaan Keluarga Miskin (UPKM), dan Masyarakat Kelurahan Ploso memiliki kemampuan untuk terlibat atau berpartisipasi. Akan tetapi, dalam perbaikan rumah tak layak huni terdapat dua hasil yang

berbeda. Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat RT 05 RW 06 menggunakan kemampuannya untuk berpartisipasi dalam program RSDK yakni pada perbaikan rumah tak layak huni milik Bapak Cholil. Partisipasi mereka didasari oleh prinsip kesetiakawanan dalam pelaksanaan program RSDK yang berarti penyelenggaraan program harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang. Masyarakat RT 05 RW 06 memiliki empati terhadap musibah kebakaran yang dialami oleh Bapak Cholil sehingga mereka mau berpartisipasi dalam perbaikan rumah tak layak huni disana melalui iuran karena mereka memiliki kemampuan secara ekonomi dan kepedulian sosial.

Sedangkan masyarakat RT 05 RW 10 tidak menggunakan kemampuannya untuk berpartisipasi dalam program RSDK, khususnya dalam hal perbaikan rumah tak layak huni milik Ibu Djamah. Hal tersebut terjadi karena masyarakat disana mengira RSDK merupakan program yang dijalankan oleh UPKM bersama Dinas Sosial tanpa melibatkan masyarakat. Hal ini bertentangan dengan prinsip partisipasi dalam pelaksanaan program RSDK dimana setiap penyelenggaraan kegiatan program harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

2. Like to

Penerima manfaat di Kelurahan Ploso menganggap program RSDK merupakan program penting bagi mereka karena dapat membantu mereka memiliki rumah yang layak huni. Sedangkan latar belakang dari UPKM yang terlibat dalam program RSDK bermacam-macam. Ada yang merasa dirinya terpenggil karena jiwa sosial yang dimiliki seperti ketua UPKM. Ada pula yang mengikuti program RSDK karena diajak atau direkomendasikan seseorang dan setelah mengerti maksud dari program RSDK timbul rasa kemanusiaan untuk saling menolong seperti bendahara UPKM.

Keterlibatan masyarakat dalam program RSDK dapat dilihat dari seberapa besar keterlibatan mereka dalam program tersebut dan seberapa besar keterikatan mereka terhadap program. Berdasarkan hasil penelitian, keterikatan masyarakat RT 05 RW 10 kurang dalam program RSDK pada perbaikan rumah Ibu Djamah. Masyarakat hanya memantau saja tanpa terlibat langsung dalam pelaksanaan program seperti yang dijelaskan oleh Bapak Soli

sebelumnya dalam wawancara dengan peneliti. Sedangkan masyarakat RT 05 RW 06 memilih terlibat karena memiliki keterikatan dengan program RSDK dimana program ini dapat membantu menjaga keindahan lingkungan dan kerukunan masyarakat.

3. *Enable to*

Kemudahan akses untuk berpartisipasi dalam program RSDK sebenarnya mudah karena mereka cukup membantu secara langsung dalam perbaikan rumah penerima program. Akan tetapi, kejelasan informasi tentang RSDK kurang menyebar luas di masyarakat Kelurahan Ploso sehingga menyebabkan ketidaksamaan respon masyarakat terhadap partisipasi dalam program RSDK di Kelurahan Ploso. Ketidaksamaan respon masyarakat Kelurahan Ploso tergambarkan dari masyarakat RT 05 RW 10 dan masyarakat RT 05 RW 06. Kemungkinan partisipasi masyarakat RT 05 RW 10 pada perbaikan rumah Ibu Djamah tidak ada karena kurangnya wawasan dan pemahaman mereka terhadap program RSDK.

4. *Asked to*

Ketidaksamaan respon masyarakat terhadap partisipasi dalam program RSDK di Kelurahan Ploso, khususnya masyarakat RT 05 RW 10 salah satunya dikarenakan kurangnya mobilisasi dari UPKM. Disisi lain, penjelasan Dinas Sosial menegaskan bahwa partisipasi masyarakat datang dari rasa kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan melalui swadaya masyarakat berupa stimulan dana, gotong royong dalam perbaikan rumah, dan lainnya. UPKM mengaku bahwa tidak ada insentif apapun dalam memobilisasi warganya untuk berpartisipasi melainkan kesadaran dan keikhlasan masyarakat sendiri untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

5. *Responded to*

Dalam pelaksanaan program RSDK, faktor "*responded to*" lebih tepat dianalisis untuk penerima manfaat dan sebagai objek sasaran program RSDK dimana keberadaan mereka serta pendapat mereka harus di respon. Di Kelurahan Ploso serta kritik dan saran mereka ditanggapi dan dijadikan masukan dalam pengambilan keputusan. Bapak M. Cholil RT 05 RW 06 mengaku rumahnya memang terpilih sebagai penerima manfaat, namun kritik tentang lamanya bantuan turun dirasa belum ditanggapi dengan baik karena butuh 2 (dua) bulan setelah pengajuan proposal bantuan baru turun. UPKM

menanggapi bahwa lamanya waktu turunnya bantuan karena masih banyak proses yang harus dilalui seperti penyeleksian dan survei rumah yang berhak mendapat bantuan dan disesuaikan dengan kuota yang diberikan oleh Dinas Sosial.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis mengenai partisipasi masyarakat Kelurahan Ploso dalam program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh dinilai kurang efektif dalam proses perbaikan rumah tak layak huni Terdapat ketidaksamaan respon dari masyarakat terhadap partisipasi dalam program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh. Ketidaksamaan respon masyarakat dapat diidentifikasi menggunakan Model CLEAR sebagai berikut:

Can Do, yakni masyarakat memiliki sumber daya berupa kemampuan dan keterampilan serta pengetahuan untuk berpartisipasi. Dilihat dari segi sosial-ekonomi serta pendidikan masyarakat Kelurahan Ploso dikatakan dapat berpartisipasi dalam program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh. Akan tetapi masyarakat RT 05 RW 10 tidak berpartisipasi dalam perbaikan rumah Ibu Djamah karena mengira program ini tidak memerlukan partisipasi masyarakat sedangkan masyarakat RT 05 RW 06 memilih berpartisipasi dalam perbaikan rumah Bapak M. Cholil karena rasa peduli dan iba atas musibah kebakaran disana.

Like To, yakni masyarakat memiliki rasa keterikatan yang memperkuat partisipasi. Masyarakat Kelurahan Ploso kurang memiliki keterikatan dengan program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh karena pemahaman masyarakat terhadap program kurang dan sosialisasi kurang merata karena hanya dilakukan saat awal munculnya program.

Enable To, yakni disediakan kesempatan untuk berpartisipasi. Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh membuka kesempatan seluas-luasnya untuk masyarakat yang ingin berpartisipasi. Akan tetapi, kurangnya keterikatan masyarakat terhadap program ini sehingga terdapat perbedaan respon masyarakat terhadap partisipasi dalam program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh di Kelurahan Ploso.

Asked To, yakni masyarakat dimobilisasi melalui lembaga-lembaga publik dan jaringan sipil. UPKM sebagai tokoh utama dalam pelaksanaan program dinilai kurang memobilisasi masyarakat luas untuk ikut berpartisipasi program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh.

Responded To, yakni adanya bukti bahwa pandangan masyarakat telah dipertimbangkan untuk perbaikan pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh yang akan datang. Masyarakat penerima

manfaat menilai bahwa memerlukan waktu yang cukup lama sejak pengajuan proposal bantuan program hingga turunnya dana bantuan. Harapannya UPKM sebagai pelaksana dan Dinas Sosial dapat mempertimbangkan solusi yang tepat untuk pelaksanaan program ini selanjutnya.

SARAN

Berdasarkan beberapa permasalahan partisipasi masyarakat dalam program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh di Kelurahan Ploso, maka peneliti memberikan saran sebagaimana berikut:

1. Masyarakat diharapkan meningkatkan kepeduliannya dan berpartisipasi dalam program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh melalui bantuan stimulan dana, bahan bangunan, maupun gotong royong dalam proses perbaikan agar tercipta kenyamanan bagi penerima program untuk memiliki rumah layak huni.
2. Dinas Sosial diharapkan memberi sosialisasi kepada masyarakat secara merata melalui sebuah pertemuan yang bisa dihadiri seluruh warga selain memberikan pembekalan bagi UPKM sebagai pelaksana program di Kelurahan. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman, kepedulian, dan partisipasi masyarakat terhadap program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh.
3. UPKM Sejahtera sebagai pelaksana program di Kelurahan Ploso diharapkan memobilisasi masyarakat luas untuk ikut berpartisipasi dan menciptakan lingkungan yang bebas kumuh dengan cara berpartisipasi dalam program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh.
4. Penerima program diharapkan dapat menjaga rumah yang layak huni setelah proses perbaikan dan tidak segan untuk memberikan kritik dan saran pada UPKM maupun Dinas Sosial demi pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh yang lebih baik lagi kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

- Pratchett, Lawrence. 2009. *Empowering Communities to Influence Local Decision Making: Evidence Based Lessons for Policy Makers and Practicioners*. United Kingdom: University Southhamton.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wirotomo, Paulus. 1997. *Analisis Dan Evaluasi hukum Tertulis Tentang Tata Cara Pemugaran Pemukiman Kumuh/Perkotaan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.

B. Artikel, Majalah atau Jurnal

- Rahardiani, N. M., Dkk. (2014). *The Relation Between Adversity Intelligence And Intention Of*

Cheating Mathematics Lessons At Student Of SMP Negeri 2 And SMP PGRI 13 In Kendal Regency. Jurnal Psikologi, Vol.2, Hal.1-14.

C. Skripsi, Tesis, atau Disertas

- Septiany, Irma. 2012. *Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dengan Penggunaan Model CLEAR di Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi*. Skripsi. Depok: Universitas Indonesia.

D. Dokumen Negara

- Bina Program Kecamatan Tambaksari. 2012. *Laporan Evaluasi Bagian Bina Program Kecamatan Tambaksari* (dikutip pada 26 April 2015).
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya. 2013. *Jumlah Penduduk Kota Surabaya Tahun 2012* (dikutip pada 24 April 2015).
- Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya. 2013. *Lingkungan Pemukiman Kumuh Kota Surabaya 2011-2012* (dikutip pada 24 April 2015).
- Dinas Sosial Kota Surabaya. 2013. *Rumah Tidak Layak Huni Menurut Kecamatan Kota Surabaya Tahun 2011-2012* (dikutip pada 24 April 2015).
- Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum. 2014. *Data Kawasan Kumuh Di Indonesia Pada Tahun 2014* (dikutip pada 26 Mei 2015).
- Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan.
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh Kota Surabaya.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

E. Internet

- _____. 2014. *Indonesia Punya 2.883 Kawasan Kumuh Di 129 Kabupaten/Kota*. (Online). (<http://www.news.viva.co.id/news/read/Indonesia-punya-2883-kawasan-kumuh-di-129-kabupaten-kota> diakses 9 Mei 2016).